BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota, Pemereintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Penerimaan pemerintah ini hendaknya diolokasikan untuk berbagai kepentingan publik atau masyarakat.

Kemendagri No. 29/2002 menyiratkan bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelolanya, Pemda diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yang meliuputi neraca daerah. laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas. Neraca Daerah menunjukan posisi keuangan pemda selama periode anggaran, kemampuan Pemda dalam menghasilkan dan mengunakan kas dari aktifitas-aktifitas yang dilaksanakannya (operasi, investasi, dan pendanaan). Dari laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan pengunaan dana tertentu dan laporan APBD dapat dianalisis sumber dan pengunaan dana tertentu dan

laporan aliran kas menyajikan informasi mengenai pemda selama satu tahun fiskal (Halim, 2002b).

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003). Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997 (Saragih, 2003).

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Maryanti dan Endrawati (2010) PAD, DAU, dan DAK merupakan bagian dari sumber keuangan pemeritah daerah. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena

merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD berdampak pada perekonomian daerah.

Menurut Undang-Undang No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan dinyatakan bahwa pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Menurut Halim (2002:65) DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaranya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan mengunakan rumus alokasi umum atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan asli masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. PDRB dalam statistik disajikan dalam dua penilaian yaitu atas harga berlaku (at current market) yaitu PDRB yang memasukkan faktor inflasi di dalamnya dan atas dasar harga konstan (at constant market price) yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi. Oleh karena itu daerah tidak akan berhasil apabila daerah tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Maryanti dan Endrawati, 2010).

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Maimunah Mutiara (2006) Flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten atau kota di pulau sumatera. Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah,pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan dengan mengambil judul **"PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)".**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja daerah?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk menguji :

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah.
2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja daerah.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah.
4. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

   Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis khususnya dalam bidang Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

   Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten atau Kota penelitian dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah.

3. Bagi pihak lain

   a. Untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah.

   b. Penulis berharap penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

E. Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang yang melandasi penelitian tentang Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah.

BAB III adalah metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV adalah analisis data dan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang pengujian data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V adalah penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi, keterbatasan penelitian dan saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya.